



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : STAF AHLI
SUB UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI SATUTI**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA**
3. NHK : **413467**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 688.205.000**

1. Tanah Seluas 2080 m2 di BOYOLALI, WARISAN Rp. 56.160.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/120 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 150.200.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 78.800.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 78.800.000
5. Tanah Seluas 1021 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 27.567.000
6. Tanah Seluas 1009 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 27.243.000
7. Tanah Seluas 529 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 14.283.000
8. Tanah Seluas 691 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
9. Tanah Seluas 551 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 45.182.000
10. Tanah Seluas 200 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 48.600.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/154 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 126.370.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	445.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2011, HASIL SENDIRI	Rp.	
200.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	
220.000.000		
3. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2012, HASIL SENDIRI	Rp.	
8.000.000		
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	
17.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	100.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	571.491.616
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.804.696.616
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.804.696.616

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.